

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Radar Solo
Media Online

Wilayah: Kabupaten Karanganyar

Halaman 5

Dua Proyek Kantor Kecamatan Molor

Kontraktor Pelaksana Terancam Denda

KARANGANYAR, Radar Solo – Memasuki masa akhir pengerjaan proyek bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, pembangunan dua kantor kecamatan masih molor.

Yakni kantor Kecamatan Jatiyoso dan Kecamatan Mojogedang. Kontraktor pelaksana dipastikan bakal menerima sanksi penalti sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16

tahun 2018. Di mana penyedia barang atau pengembang di-denda satu per mil jika dalam proyek tersebut molor atau meleset dari target.

Camat Jatiyoso Budi Santoso mengatakan, berdasarkan laporan, progres pembangunan kantor Kecamatan Jatiyoso baru mencapai 80 persen. Padahal sesuai kesepakatan awal, ditarget selesai 28 Desember mendatang.

"Pengembang sudah mengajukan penambahan waktu awal bulan kemarin. Pengembang merasa tidak bisa menye-

PROGRES PROYEK DI AKHIR TAHUN

Tahun ini Pemkab Karanganyar membangun enam kantor kecamatan baru. Berikut daftarnya:

- Jaten
- Tasikmadu
- Matesih
- Jatiyoso
- Jumantono
- Mojogedang

- Masing-masing menghabiskan anggaran Rp 3,8 miliar.
- Pembangunan kantor Kecamatan Jatiyoso dan Mojogedang terancam molor.

lesaikan pekerjaan tepat waktu," kata Budi kepada *Jawa Pos Radar Solo*, kemarin (19/12).

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Sugeng Raharto mengaku, masih memonitoring progres sejumlah proyek bersumber APBD 2019. Terutama pembangunan enam kantor kecamatan. Yakni Jaten, Tasikmadu, Matesih, Jatiyoso, Jumantono, dan Mojogedang. Masing-masing menghabiskan anggaran Rp 3,8 miliar.

"Dua proyek kecamatan itu kemungkinan molor. Kalau yang empat saya kira bisa selesai tepat waktu. Saya berharap bisa dikebut. Tapi kalau tidak tepat wak-

tu ya konsekuensinya denda atau sanksi sesuai dengan perpres yang berlaku," ucap Sugeng.

Di sisi lain, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Titik Umarni menjelaskan, penggunaan anggaran untuk proyek kecamatan adalah masing-masing camat. Namun demikian, pihaknya juga menginventarisasi sejumlah proyek tidak rampung tahun ini.

"Kami masih memonitoring proyek mana saja kemungkinan tidak selesai tepat waktu," ucap Titik. (rud/adi)



RUDI HARTONO/RADAR SOLO

MOLOR: Proyek pembangunan kantor Kecamatan Mojogedang.